

PELAPORAN DAN KINERJA PERTANGGUNGJAWABAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN-PERUSAHAAN PUBLIK PESERTA PROPER DI INDONESIA

Nur Cahyonowati
Universitas Diponegoro

ABSTRACT

This research aims to examine the difference of environment disclosure before and after the presence of the new corporation act, Act No. 40 (2007). This new regulation should be able to enhance corporate environmental responsibility. The greater compliance should be directed to the participants of program for environmental ranking (widely known as PROPER). This research also examines two competing theory which is used in most related research to predict the relationship between environmental disclosure and environmental performance i.e. economic-based theory and social political-based theory (Clarkson et al., 2008).

The results indicated insignificant increase of environmental disclosure score after the presence of new regulation. This research suggested that economic-based theory is more likely to predict the relation between environmental disclosure and environmental performance.

Key words : environmental responsibility, environmental performance, PROPER, economic-based theory, social political-based theory.

PENDAHULUAN

Pelaporan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (selanjutnya disingkat TJSL) belum menjadi hal yang diwajibkan sebelum disahkannya UU No 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Meskipun demikian masih terdapat penolakan dari kalangan perusahaan terhadap kewajiban pelaporan TJSL tersebut. Namun dengan adanya regulasi UU No 40 tahun 2007 tersebut, perusahaan mau tidak mau harus melaporkan aktivitas-aktivitas TJSL dalam pelaporan keuangannya. Dari segi teoritis, masih belum ada kesepakatan bagaimana seharusnya TJSL dilaporkan (Gray *et al.*, 1995). Oleh karena itu, masih menjadi pertanyaan penelitian bagaimana perusahaan-perusahaan di Indonesia melaporkan TJSL. Selain itu, masih menjadi pertanyaan penelitian yaitu apakah amanat dari UU No 40 tahun 2007 menyebabkan perubahan tingkat pelaporan TJSL yang dilakukan perusahaan-perusahaan di Indonesia. Jika perusahaan patuh pada UU tersebut maka seharusnya terdapat perbaikan dan peningkatan dalam metode dan tingkat pelaporan TJSL perusahaan-perusahaan publik di Indonesia. Penelitian ini berfokus pada tanggung jawab perusahaan kepada lingkungan (selanjutnya disingkat TJL).

Salah satu isu penting dalam penelitian TJSL khususnya mengenai lingkungan adalah bagaimana hubungan antara tingkat pelaporan TJL dan tingkat kinerja TJL (Clarkson *et al.*, 2008). Isu ini masih penting diteliti karena hasil-hasil penelitian TJL sebelumnya menunjukkan hasil yang belum konsisten (Paten, 2002). Selain itu, ada dua teori yang bertentangan

(*competing theory*) yang dapat menjelaskan pengaruh tingkat pelaporan TJL dan tingkat kinerja lingkungan yaitu teori berbasis ekonomis dan teori berbasis sosial politis. Hanya penelitian Clarkson *et al.* (2008) yang telah menguji teori mana yang relevan dalam menjelaskan praktek TJL dan menunjukkan bahwa dalam konteks praktek TJL di Amerika Serikat, teori berbasis ekonomis-lah yang dapat menjelaskan pengaruh tingkat pelaporan TJL pada tingkat kinerja TJL. Oleh karena itu, dalam konteks Indonesia, masih penting untuk meneliti bagaimana hubungan antara tingkat pelaporan TJL pada tingkat kinerja TJL. Isu ini penting diangkat mengingat penelitian-penelitian TJSL di Indonesia baru mengangkat isu faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat pelaporan TJSL (misal Rizal, 2001; Cahyonowati 2003, 2008; Suratno, 2006; dan Anggraini, 2006) dan belum menguji hubungan antara tingkat pelaporan TJL dan tingkat kinerja TJL.

Dengan menguji hubungan antara dua variabel tersebut, maka hasil penelitian ini dapat menunjukkan teori mana yang relevan dalam menjelaskan praktek pelaporan TJL di Indonesia. Selain itu, bagaimana dampak tingkat kinerja TJL pada tingkat pelaporan TJL juga penting diteliti karena Badan Penyusun Standar Akuntansi dan Regulator Pasar Modal saat ini sedang meningkatkan perhatiannya pada defisiensi pelaporan TJL perusahaan (Clarkson *et al.*, 2008). Hal ini disebabkan badan-badan tersebut belum meyakini bahwa tingkat pelaporan TJL yang banyak dilakukan perusahaan merupakan cerminan dari kinerja TJL aktual.

Penelitian ini berkontribusi dengan memberikan bukti empiris bagaimana dampak UU No 40 tahun 2007 pada perubahan tingkat pelaporan TJL perusahaan-perusahaan publik di Indonesia, dan hubungan antara kinerja TJL dan tingkat pelaporan TJL perusahaan-perusahaan publik di Indonesia. Dengan bukti empiris tersebut diharapkan memperkaya literatur akuntansi tentang model pelaporan TJL. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan evaluasi kebijakan dan regulasi TJL lebih lanjut. Regulasi TJL menjadi sesuatu yang sangat mendesak untuk mencegah semakin besarnya kerusakan lingkungan akibat aktivitas bisnis perusahaan-perusahaan yang kurang bertanggung jawab.

Bagi pemerintah, hasil penelitian ini diharapkan menjadi input bagi pengembangan Program Pembangunan yang berkelanjutan (*sustainability development*). Jalal (2008) menyatakan pentingnya Pemerintah membangun kemitraan untuk pembangunan yang berkelanjutan dengan membentuk kelompok kerja TJSL yang terdiri dari wakil-wakil pemerintah, perusahaan, dan organisasi masyarakat sipil. Program tersebut diharapkan dapat mencapai visi mewujudkan TJSL perusahaan sebagai kontribusi signifikan atas pembangunan daerah yang berkelanjutan. Dengan program tersebut dapat diciptakan TJSL perusahaan sebagai minimisasi dampak negatif serta maksimisasi dampak positif operasi perusahaan serta terciptanya sinergi program dan sumber daya pembangunan yang dilaksanakan secara bersama-sama oleh Pemda, swasta, dan kelompok masyarakat sipil. Bagi regulator standar akuntansi dan pasar modal, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi tentang efisiensi pelaporan TJL mengingat adanya kemungkinan pelaporan TJL yang baik bukan merupakan cerminan kinerja aktual TJL.

TELAAH TEORITIS DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Konsep Akuntansi Sosial dan Lingkungan

Asumsi entitas dalam akuntansi keuangan tradisional mengabaikan transaksi atau peristiwa yang tidak mempunyai dampak langsung bagi suatu entitas. Akuntansi keuangan

tradisional mendefinisikan biaya sedemikian rupa sehingga mengeluarkan pengakuan terhadap dampak operasi entitas pada sumber daya (lingkungan dan sosial) yang tidak dikontrol oleh entitas tersebut. Dengan kerusakan lingkungan dan dampak buruk dari operasi bisnis entitas maka muncul konsep akuntansi sosial. Akuntansi sosial dan lingkungan memfokuskan pada tiga bidang yaitu sosial, lingkungan, dan karyawan. Konsep dalam akuntansi sosial dan lingkungan menggeser orientasi laba perusahaan ke orientasi pengembangan bisnis yang berkelanjutan (*sustainable*) yang diharapkan dapat berkontribusi pada pembangunan masyarakat secara berkelanjutan. Laporan yang dibuat oleh *World Commission of Environment and Development* mendefinisikan pembangunan yang berkelanjutan sebagai sebuah pembangunan yang memenuhi kebutuhan masyarakat dunia pada saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi masa mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri (Deegan, 1999).

Implementasi dari akuntansi sosial dan lingkungan adalah pelaporan rekening *triple bottom line* yang memberikan informasi tentang kinerja ekonomi, lingkungan dan sosial sebuah entitas. Hal ini merupakan pergeseran dari pelaporan akuntansi keuangan tradisional selama ini yang hanya memfokuskan pada informasi kinerja ekonomi (laba) sebuah entitas (Deegan, 1999).

Gray *et al.* (1995) menjelaskan adanya 3 (tiga) teori relevan dalam menjelaskan pelaporan TJSL sebuah entitas yaitu :

a. Teori Kebermanfaatan Keputusan (*Decision-Usefulness Theory*)

Teori ini menyatakan bahwa pengguna laporan keuangan (seperti investor, analis, kreditur, pemerintah, dan sebagainya) memerlukan informasi TJSL dalam rangka proses pengambilan keputusan (Parker, 1995). Informasi yang diperlukan dalam proses pengambilan keputusan terutama adalah informasi bahwa sebuah entitas tidak melanggar etika sosial dan lingkungan dalam operasi bisnisnya.

b. Teori Ekonomis (*Economic Theory*)

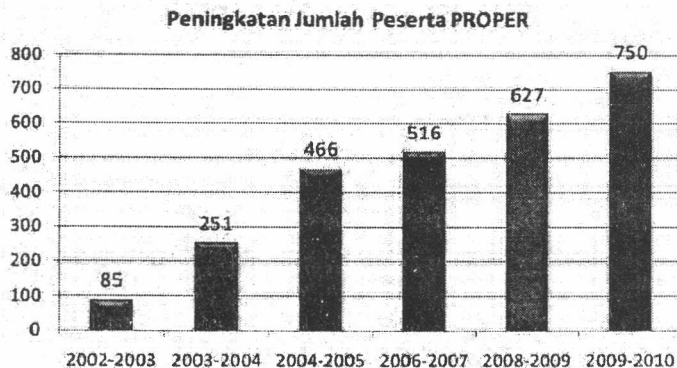
Teori ini mendasarkan pada teori keagenan dan teori akuntansi positif yang menyatakan adanya pemisahan antara pihak manajemen (sebagai agen) dan pihak pemilik (sebagai prinsipal) dalam pengelolaan bisnis sebuah entitas. Informasi TJSL dalam hal ini digunakan oleh prinsipal untuk mengevaluasi apakah tindakan manajemen sudah sesuai dengan kepentingan pemilik perusahaan. Terkait dengan pengungkapan informasi (termasuk informasi TJSL), teori ini menyatakan bahwa perusahaan mempunyai insentif yang kuat untuk mengungkapkan informasi yang “baik” (*good news*) untuk membedakan diri mereka dengan perusahaan-perusahaan lain yang mempunyai informasi yang “buruk” (*bad news*) dalam rangka menghindari masalah pemilihan yang tidak tepat (*adverse selection*) (Verrechia, 1983).

c. Teori Sosial dan Politis (*Social and Political Theory*)

Teori ini disebut juga sebagai teori legitimasi karena entitas melaporkan TJSL untuk memberikan justifikasi bahwa operasinya sudah sesuai dengan norma-norma dan nilai-nilai kemasyarakatan. Legitimasi tersebut sangat penting untuk mendukung eksistensi entitas dalam masyarakat. Teori ini dapat menjelaskan mengapa semakin banyak perusahaan di Indonesia yang mengikuti Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup (PROPER) dari Kementerian Negara

Lingkungan Hidup (KLH) seperti nampak pada Gambar 1. Mereka ingin memperoleh legitimasi dari masyarakat bahwa operasi bisnisnya tidak merusak lingkungan (dengan kata lain telah sesuai norma-norma masyarakat). Dalam jangka panjang jika legitimasi tersebut telah diperoleh maka keuntungan perusahaan juga akan terus meningkat.

Gambar 1.
Jumlah Perusahaan Peserta PROPER



Sumber: Laporan PROPER KLH periode 2008-2009

Terkait dengan pengungkapan informasi TJL, teori ini menyatakan bahwa pengungkapan informasi TJL merupakan fungsi dari tekanan sosial dan politis yang sedang dihadapi perusahaan. Menurut teori ini, jika perusahaan mempunyai kinerja TJL yang buruk maka hal ini dapat menyebabkan adanya tekanan sosial dan politis yang besar dan dapat mengancam legitimasinya. Untuk mengurangi tekanan tersebut maka perusahaan-perusahaan yang mempunyai kinerja buruk tersebut akan meningkatkan jumlah pengungkapan TJL dengan tujuan mengubah persepsi masyarakat tentang kinerja aktual TJL tersebut.

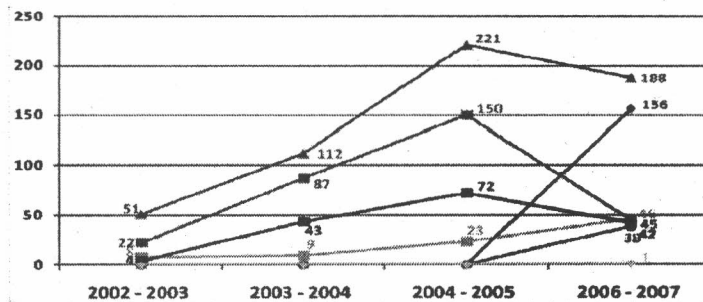
Regulasi Pertanggungjawaban Lingkungan Perusahaan di Indonesia

Terkait dengan isu lingkungan, Pemerintah Indonesia telah menerbitkan UU No 4 tentang prinsip-prinsip pengelolaan lingkungan pada tahun 1982. UU ini kemudian diperbaiki dalam UU No 23 tahun 1997. Sejak Juni 1995, Kementerian Negara Lingkungan Hidup (KLH) telah meluncurkan Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup (PROPER). Program ini menggunakan sistem pengkodean warna dalam penilaian kinerja lingkungan perusahaan yaitu dengan memberikan jenis warna tertentu sesuai peringkat kinerja perusahaan. Terdapat 5 peringkat warna dengan tujuh kategori yang digunakan yaitu emas, hijau, biru, biru minus, merah, merah minus, dan hitam.

Dari pelaksanaan PROPER selama periode 2002 – 2007 terlihat bahwa telah terjadi peningkatan kinerja TJL perusahaan. Sebagaimana yang terlihat pada Gambar 2 di bawah,

jumlah perusahaan yang taat yaitu Hijau dan Biru meningkat selama periode 2002 – 2007. Peningkatan jumlah perusahaan yang taat selama periode ini terjadi karena adanya peningkatan jumlah perusahaan dan perbaikan kinerja penataan perusahaan peserta PROPER.

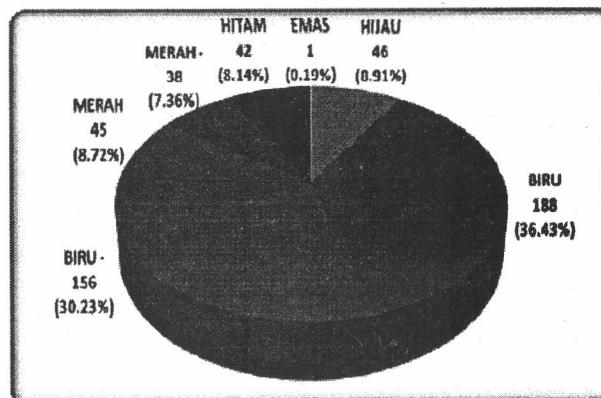
Gambar 2.
Perkembangan Peringkat Kinerja PROPER



Sumber: Laporan PROPER KLH periode 2006-2007

Pada periode 2006-2007, KLH melaporkan perusahaan yang taat (peringkat emas, hijau, biru, dan biru minus) mencapai 75,78% dari total 516 perusahaan. Meskipun demikian, perusahaan yang mencapai peringkat emas hanya 0,19% (Gambar 3).

Gambar 3.
Distribusi Frekuensi Peringkat Kinerja PROPER



Sumber: Laporan PROPER KLH periode 2006-2007

Untuk perusahaan-perusahaan publik yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI), hasil penelitian Suratno (2006) menunjukkan bahwa tidak ada satupun perusahaan publik di Indonesia yang mendapat rating emas pada tahun 2002-2005. Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas perusahaan publik di Indonesia hanya sekedar menaati regulasi. Hal ini juga menun-

jukkan belum berjalan baiknya praktek TJL perusahaan-perusahaan publik di Indonesia, karena konsep TJL adalah sukarela (*voluntary*) dalam arti perusahaan seharusnya secara sukarela taat di atas batas minimal menurut regulasi atau mencapai peringkat emas.

Pengujian tingkat pelaporan TJSL dalam laporan tahunan perusahaan-perusahaan publik di Indonesia telah dilakukan oleh Cahyonowati (2003). Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa 100% sampel perusahaan mengungkapkan pertanggungjawaban sosial terkait dengan sumber daya manusia (karyawan). Hanya 26% sampel perusahaan yang mengungkapkan pertanggungjawaban lingkungan, dan hanya 5% yang melaporkan aktivitas-aktivitas konservasi energy.

Hasil penelitian Anggraini (2006) juga menunjukkan bahwa perusahaan-perusahaan publik di Indonesia mengungkapkan pertanggungjawaban sosial terkait dengan isu karyawan dan hanya sedikit yang melaporkan pertanggungjawaban lingkungan. Hal ini menunjukkan bahwa kepedulian lingkungan mayoritas perusahaan-perusahaan publik di Indonesia masih belum baik. Dari segi metode pelaporan, penelitian Cahyonowati (2003) dan Anggraini (2006) menunjukkan bahwa mayoritas sampel perusahaan menggunakan metode pelaporan non moneter. Pelaporan pertanggungjawaban sosial dengan mengungkapkan isu karyawan dan metode non moneter merupakan pilihan yang mudah bagi perusahaan (Gray *et al.*, 1995).

Dampak UU No 40 Tahun 2007 pada Tingkat Pelaporan Tanggung Sosial dan Lingkungan (TJSL) Perusahaan-perusahaan di Indonesia

Seperti dinyatakan pada bagian sebelumnya, regulasi pelaporan TJSL dalam UU No. 5 tahun 1995 tidak mewajibkan pelaporan tersebut. Pengungkapan TJSL dikategorikan sebagai pengungkapan sukarela (*voluntary disclosure*). Adanya regulasi terbaru, UU No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (PT) telah mengamanatkan perusahaan untuk melaporkan aktivitas TJSL-nya. Aturan ini diundangkan sejak 16 Agustus 2007. Bunyi pasal 74 yang mengatur tentang TJSL selengkapny adalah:

- (1) Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.
 - (2) Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.
 - (3) Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan diatur dengan Peraturan Pemerintah
- (Sumber: UU No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas).

Kewajiban pelaporan TJSL khususnya mengenai lingkungan tersebut seharusnya meningkatkan tingkat pelaporan TJL dalam laporan tahunan perusahaan-perusahaan publik pada tahun 2007. Oleh karena itu, dapat diajukan hipotesis bahwa jika UU tersebut efektif, maka tingkat pelaporan TJL perusahaan akan meningkat pada laporan tahunan 2008 dan 2009

dibandingkan pada laporan tahunan sebelum UU tersebut disahkan (tahun 2006). Namun hipotesis tersebut masih perlu diuji secara empiris karena ada 2 (dua) faktor yang menghambat peningkatan pelaporan TJSL yaitu: (1) Belum ada aturan terperinci di bawah UU No. 40 tahun 2007 (seperti PP) yang mengatur secara lebih teknis bagaimana mekanisme pelaporan TJSL, dan (2) Adanya penentangan (retensi) dari kalangan pengusaha terhadap kewajiban melaporkan TJSL. Kedua faktor tersebut mungkin menyebabkan tidak terjadinya peningkatan pelaporan TJL setelah disahkannya UU No. 40 tahun 2007. Namun, dengan mendasarkan pada teori legitimasi, dan mengasumsikan bahwa perusahaan ingin mendapatkan legitimasi bahwa operasi bisnisnya telah sesuai dengan norma-norma masyarakat, maka diajukan hipotesis berikut:

H1: Tingkat pelaporan TJL dalam laporan tahunan perusahaan-perusahaan publik di Indonesia meningkat secara signifikan setelah disahkannya UU No. 40 tahun 2007 dibandingkan sebelum adanya regulasi tersebut.

Hubungan antara Tingkat Kinerja TJL dan Pelaporan TJL

Terdapat dua teori yang dapat digunakan untuk memprediksikan hubungan antara tingkat kinerja TJL dan tingkat pelaporan TJL yaitu teori berbasis ekonomis dan teori berbasis sosial-politik (Clarkson *et al.*, 2008). Teori berbasis ekonomis disebut juga teori pengungkapan sukarela (*voluntary disclosure theory*). Verrechia (1983) memprediksi adanya sebuah hubungan positif antara tingkat kinerja TJSL dengan tingkat pelaporan TJSL. Argumentasinya adalah perusahaan-perusahaan yang mempunyai kinerja TJSL yang baik mempunyai insentif untuk menunjukkan kinerja tersebut melalui pengungkapan informasi tentang indikator-indikator kunci kinerja TJSL yang tidak dapat dicapai oleh perusahaan-perusahaan yang lebih inferior kinerja TJSL-nya. Tindakan ini dilakukan karena perusahaan yang mempunyai "good news" (yaitu perusahaan dengan kinerja TJSL yang baik) cenderung untuk mengungkapkannya agar pengguna informasi bisa membedakan perusahaan tersebut dengan perusahaan lain dengan "bad news" (yaitu perusahaan dengan kinerja TJSL yang kurang baik). Perusahaan-perusahaan dengan kinerja TJSL yang superior karena strategi TJSL yang proaktif mempunyai insentif untuk memberikan informasi tersebut kepada investor dan pemangku kepentingan (*stakeholders*) lainnya. Dengan mengungkapkan informasi tentang kinerja TJSL yang baik tersebut (sebagai *good news*), perusahaan ingin menunjukkan "kelasnya" yang berbeda dengan perusahaan lain. Harapannya adalah terjadinya peningkatan nilai perusahaan di mata investor karena kinerja TJSL yang baik merupakan indikasi bahwa kewajiban TJSL perusahaan tersebut lebih rendah (sehingga terjadi peningkatan aliran kas di masa mendatang) dibanding perusahaan lain dengan kinerja TJSL yang buruk. Dengan argumentasi tersebut, teori berbasis ekonomis memprediksi adanya hubungan positif antara tingkat kinerja TJSL dengan tingkat pelaporan TJSL yaitu semakin baik kinerja TJSL maka akan semakin banyak informasi TJSL yang dilaporkan.

Prediksi sebaliknya dinyatakan oleh teori berbasis sosial politis (bisa disebut juga teori legitimasi atau teori ekonomi politis). Menurut teori ini, jika perusahaan mempunyai kinerja TJSL yang buruk maka hal ini dapat menyebabkan adanya tekanan sosial dan politis yang besar dan dapat mengancam legitimasinya. Untuk mengurangi tekanan tersebut maka perusahaan-perusahaan yang mempunyai kinerja yang buruk tersebut akan meningkatkan jumlah pengungkapan TJSL dengan tujuan mengubah persepsi masyarakat tentang kinerja aktual TJSL tersebut

(Clarkson *et al.*, 2008). Secara terperinci, dengan mengutip Gray *et al.* (1995), Clarkson *et al.* (2008) menyatakan bahwa perusahaan-perusahaan yang terancam legitimasinya karena kinerja TJSL yang buruk mempunyai insentif untuk meningkatkan pengungkapan informasi TJSL dengan tujuan: (1) menginformasikan kepada publik tentang perubahan-perubahan kinerja TJSL yang telah mereka lakukan, (2) mengalihkan perhatian dari isu kinerja TJSL yang buruk dengan menekankan informasi TJSL dari aspek lain, dan (3) mencoba untuk mengubah persepsi dan ekspektasi publik. Menurut Paten (2002), teori berbasis sosial politis akan memprediksi hubungan negatif antara tingkat kinerja TJSL dengan tingkat pelaporan TJSL yaitu semakin buruk kinerja TJSL maka akan semakin banyak informasi TJSL yang dilaporkan. Karena teori berbasis ekonomis dan teori berbasis sosial politis memberikan prediksi yang berlawanan tentang arah hubungan tingkat kinerja TJL dengan tingkat pelaporan TJL serta penelitian ini masih bersifat eksploratori, maka dinyatakan hipotesis tanpa arah sebagai berikut:

H2: Terdapat hubungan antara tingkat kinerja TJL dengan tingkat pelaporan TJL

METODE PENELITIAN

Sampel Penelitian

Sampel penelitian ini adalah perusahaan-perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2006 – 2009 dan ikut menjadi peserta PROPER. Tahun 2006 - 2009 dipilih karena merupakan periode-periode sebelum dan sesudah disahkannya UU No. 40 tahun 2007 sehingga dapat menunjukkan dampak dari regulasi tersebut. Pemilihan sampel menggunakan metode *purposive sampling* yaitu sampel akhir dipilih berdasar kelengkapan data yang diperlukan dalam pengukuran variabel-variabel penelitian untuk periode 2006 - 2009.

Identifikasi perusahaan publik peserta PROPER bersumber dari Pengumuman Penilaian PROPER yang dipublikasi pada website Kementerian Lingkungan Hidup. Sampel akhir penelitian ini terdiri dari 36 perusahaan publik yang menjadi peserta PROPER selama tahun 2006 – 2009 dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 1.
Sampel Penelitian

Keterangan	Jumlah Perusahaan
Jumlah peserta PROPER tahun 2008 – 2009	627
Jumlah peserta PROPER non-perusahaan publik	(591)
Jumlah Sampel Akhir	36

Jumlah pengamatan selama 2006 – 2009 menjadi 144 tahun perusahaan (firm years)

Sumber: data penelitian, 2011

Definisi Operasional Variabel Penelitian

1. Variabel Terikat: Tingkat Pelaporan TJL

Pengukuran tingkat pelaporan TJL dilakukan dengan analisis kandungan (*content analysis*) terhadap pengungkapan informasi TJL yang ada dalam laporan tahunan

perusahaan. Instrumen yang dikembangkan oleh Clarkson et. al. (2008) akan digunakan untuk pengukuran variabel tingkat pelaporan TJL.

2. Variabel Tidak Terikat: Tingkat Kinerja TJL

Pengukuran kinerja TJL menggunakan proksi berupa peringkat kinerja PROPER yang dikeluarkan oleh KLH. Pengukuran berdasarkan pada peringkat PROPER yaitu 7=emas, 6=hijau, 5=biru, 4=biru minus, 3=merah, 2=merah minus, dan 1=hitam. Pemberian kode tersebut menunjukkan urutan peringkat dengan skor 7 merupakan kinerja TJL terbaik dan skor 1 menunjukkan kinerja TJL terburuk.

3. Variabel-variabel Kontrol

Terdapat beberapa variabel kontrol yang digunakan dalam penelitian ini yang perlu dimasukkan ke dalam model untuk meningkatkan validitas internal yaitu:

1) Tingkat Profitabilitas Perusahaan

Beberapa penelitian tentang pengungkapan menunjukkan bahwa perusahaan-perusahaan dengan kinerja laba yang superior mempunyai kecenderungan untuk memperbanyak pengungkapan informasi tersebut dalam rangka menunjukkan "good news" kepada investor. Oleh karena itu, perlu dikontrol pengaruh tingkat profitabilitas pada tingkat pelaporan TJSL. Tingkat profitabilitas diukur dengan *return on assets* (ROA) yaitu laba bersih dibagi dengan *lagged total assets* pada akhir tahun.

2) Ukuran Perusahaan

Sesuai dengan teori agensi dan teori legitimasi, Hacton dan Milne (1996) menyatakan adanya hubungan antara ukuran perusahaan dan tingkat pengungkapan. Perusahaan-perusahaan besar cenderung lebih banyak melakukan aktivitas-aktivitas bisnis dibanding perusahaan-perusahaan kecil karena mempunyai dampak yang lebih besar pada sosial masyarakat. Perusahaan-perusahaan besar juga mempunyai lebih banyak *stakeholders* yang terlibat sehingga lebih banyak informasi (termasuk informasi TJSL) yang perlu diungkapkan. Berdasarkan teori akuntansi positif, perusahaan-perusahaan besar juga lebih banyak menghadapi biaya politis dibanding perusahaan-perusahaan kecil (Watts dan Zimmerman, 1986). Salah satu cara untuk mengurangi tekanan politis tersebut adalah dengan mengungkapkan lebih banyak informasi (termasuk informasi TJSL) untuk menunjukkan bahwa aktivitas bisnis perusahaan telah sesuai dengan norma-norma kemasyarakatan. Ukuran Perusahaan diukur menggunakan kapitalisasi pasar karena sampel penelitian adalah perusahaan publik. Kapitalisasi perusahaan merupakan perkalian antara harga saham dan jumlah saham yang beredar pada akhir tahun.

3) Tingkat Kepemilikan Publik

Sesuai dengan teori agensi, manajemen perusahaan akan berusaha untuk memenuhi kepentingan pemegang saham (*shareholders*) selaku prinsipal. Konsep prinsipal sendiri sekarang bergeser tidak hanya pemegang saham saja namun *stakeholders* secara keseluruhan yang di dalamnya termasuk masyarakat (publik), pemerintah dan kreditur. Tingkat kepemilikan publik dianggap sebagai

salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat pengungkapan (*disclosure*). Marwata (2001) berargumen bahwa semakin besar persentase kepemilikan publik maka akan semakin besar pula tingkat pengungkapan informasi dalam laporan tahunan. Semakin besar tingkat kepemilikan publik maka semakin besar kecenderungan perusahaan untuk mengungkapkan informasi tentang aktivitas-aktivitas TJSL-nya dalam rangka memenuhi ekspektasi publik (Sawarjono, 2000). Tingkat kepemilikan publik diukur dengan persentase saham yang dimiliki oleh publik pada akhir tahun.

Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis 1 (H1) menggunakan *t-test* untuk membandingkan rata-rata tingkat pelaporan TJL pada laporan tahunan perusahaan-perusahaan publik di Indonesia sebelum UU No 40 tahun 2007 disahkan (tahun 2006) dan setelah UU No 40 tahun 2007 disahkan (tahun 2008 dan 2009).

Pengujian hipotesis 2 (H2) menggunakan analisis korelasi antara skor pelaporan TJL dengan kinerja TJL. Selain itu hubungan antara pelaporan TJL dan kinerja TJL diuji dengan analisis *multiple regression* dengan persamaan sebagai berikut:

$$Pel_TJL_{i,t} = \alpha + \beta_1 Kin_TJL_{i,t} + \beta_2 LogSize_{i,t} + \beta_3 Profit_{i,t-1} + \beta_4 Own_{i,t} + e$$

Keterangan:

Pel_TJL = Tingkat Pelaporan TJL perusahaan i pada tahun t

Kin_TJL = Kinerja TJL perusahaan i pada tahun t

Logsize = logaritma natural kapitalisasi pasar perusahaan i pada tahun t

Profit = laba setelah pajak dibagi dengan lagged total aset perusahaan i pada tahun t

Own = Kepemilikan publik perusahaan i pada tahun t

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Profil kinerja lingkungan perusahaan publik adalah sebagai berikut

Tabel 2.
Kinerja Lingkungan Perusahaan Publik

Periode	Emas	Hijau	Biru	Biru Minus	Merah	Merah Minus	Hitam	Jumlah
Proper 2004 - 2005		3	17		2			22
Proper 2006 - 2007		9	11	9	2	1		32
Proper 2008 - 2009	1	8	12	7	4		2	34

Sumber: data diolah, 2011

Tabel tersebut menunjukkan bahwa mayoritas perusahaan publik memperoleh peringkat biru selama tiga periode penilaian PROPER. Hanya satu perusahaan publik yang memperoleh peringkat emas, yaitu PT. Indocement Tunggul Prakarsa, Tbk. Namun demikian, terdapat dua perusahaan publik yang mendapat peringkat hitam yaitu PT. Suparma, Tbk dan PT. Daya Sakti

Unggul Corporation, Tbk. Berdasarkan kategori PROPER, perusahaan publik seharusnya mencapai kategori merah minus, yang artinya telah melakukan upaya pelestarian lingkungan hidup meskipun hanya berdampak kecil. Perusahaan publik dengan kategori hitam menunjukkan bahwa perusahaan tersebut belum melakukan upaya pelestarian lingkungan hidup.

Terdapat 16 perusahaan publik yang tidak menyajikan pelaporan mengenai TJL pada *annual report*, *sustainability report* dan *website*. Sesuai dengan penelitian Clarkson et al (2008), perusahaan – perusahaan tersebut tetap menjadi sampel penelitian dengan skor pelaporan TJL nol atau disebut '*silent company*' (daftar *silent company* terdapat pada Lampiran).

Clarkson et al (2008) membagi item disclosure ke dalam 2 kategori yaitu *hard disclosure* dan *soft disclosure*. Item *hard disclosure* digunakan untuk mengidentifikasi pelaporan TJL yang susah untuk ditiru oleh perusahaan lain karena membutuhkan banyak alokasi sumber daya. Sedangkan item *soft disclosure* merupakan item pelaporan yang relatif mudah ditiru oleh perusahaan lain. Penelitian ini menggunakan data *annual report* perusahaan publik peserta PROPER antara tahun 2006 – 2009. *Annual report* perusahaan yang tidak bisa diakses pada corporate web diberi skor pelaporan sebesar nol. Uji statistik menunjukkan bahwa perusahaan lebih banyak mengungkapkan item *hard disclosure* (*t test* sebesar 3,921). Rata-rata skor *hard disclosure* adalah 2,59 sedangkan rata-rata skor *soft disclosure* adalah 1,37. Beda signifikan ini tetap robust jika "*silent company*" dikeluarkan dari sampel.

Pengujian Hipotesis 1

UU No. 40 tahun 2007 mewajibkan perusahaan untuk memenuhi tanggung jawab sosialnya termasuk tanggung jawab lingkungan. Uji t dilakukan untuk mengetahui perbedaan skor pelaporan pada periode sebelum dan setelah UU tersebut berlaku efektif. Hasil uji statistik menunjukkan bahwa terdapat perbedaan skor pelaporan yang tidak signifikan pada periode sebelum dan setelah UU No. 40 tahun 2007 berlaku efektif (*t-test* sebesar 0,546). Rata-rata skor pelaporan TJL pada periode sebelum peraturan berlaku (tahun 2006) adalah sebesar 3,42. Setelah peraturan tersebut berlaku efektif (periode 2008-2009) rata – rata skor pengungkapan TJL menjadi 4,36. Hasil ini menunjukkan bahwa belum terjadi revolusi peningkatan pelaporan TJL sejak UU No. 40 tahun 2007 diberlakukan dan oleh karena itu, H1 tidak dapat diterima.

Pengujian Hipotesis 2

Hubungan antara pelaporan TJL dan kinerja TJL dapat diprediksi dengan dua basis teori yaitu teori berbasis ekonomis dan teori berbasis sosial-politik. Selama periode pengamatan terdapat 121 tahun perusahaan (*firm years*) yang memiliki data kinerja TJL dan pengungkapan TJL pada *annual report*, *sustainability report* dan *web*. Hasil uji korelasi antara pelaporan TJL dan kinerja TJL menunjukkan koefisien korelasi Spearman sebesar 0,322 yang signifikan pada level 5%. Berdasarkan hasil tersebut, hubungan antara pengungkapan TJL dan kinerja TJL dapat diprediksi dengan teori berbasis ekonomi.

Uji regresi dilakukan untuk mengetahui apakah kinerja TJL merupakan faktor penentu pelaporan TJL. Namun demikian, terdapat masalah autokorelasi pada hasil uji regresi *OLS* yang menyebabkan *standard error* koefisien regresi menjadi bias (semakin besar) dan tidak

bisa digunakan sebagai prediktor dengan minimum variances (intersep dan koefisien regresi tidak lagi memenuhi asumsi *BLUE*). Berry dan Feldman (1985) menyatakan bahwa masalah tersebut dapat diatasi dengan teknik estimasi *generalized least square (GLS)*. Teknis estimasi *OLS* dapat dimodifikasi dengan prosedur *weighted least square (WLS)* yang menghasilkan estimasi yang sebanding dengan GLS sehingga diperoleh koefisien regresi yang *BLUE*. Untuk menghasilkan regresi dengan teknik *WLS* maka variabel independen ukuran perusahaan digunakan sebagai pembobot. Hasil regresi dengan teknik estimasi *WLS* adalah sebagai berikut:

Tabel 4.
Hasil Uji Regresi - WLS

Variabel terikat:	
Pel_TJL	
Variabel tidak terikat:	
Constant	-1,828 (-0,712)
Kin_TJL	1,031** (2,031)
Own	-1,699 (-0,456)
Profit	18,737*** (4,685)
F test 12,049***, n = 98	
Adj R square 25,47%	

*** signifikan pada 0,01; ** signifikan pada 0,05; * signifikan pada 0,1

Nilai t terdapat pada tanda kurung. Variabel yang digunakan sebagai pembobot adalah ukuran perusahaan. *Standard error* koefisien regresi *WLS* lebih kecil (menurun) dibandingkan *standard error* koefisien regresi *OLS*.

Sumber: data diolah, 2011

Pada model regresi *WLS*, koefisien regresi variabel kinerja TJL berpengaruh positif terhadap pengungkapan TJL. Hasil ini konsisten dengan hasil uji korelasi bahwa terdapat hubungan positif antara score TJL dengan kinerja TJL. Berdasarkan pada hasil uji korelasi dan regresi *WLS*, maka H2 diterima. Hasil regresi juga menunjukkan bahwa hanya variabel kontrol profit yang berpengaruh signifikan pada skor pengungkapan TJL.

Pembahasan Hasil Penelitian

Penelitian ini menemukan bahwa tidak terjadi perubahan tingkat pelaporan TJL setelah UU No. 40 tahun 2007 ditetapkan. Temuan ini menunjukkan bahwa UU tersebut belum mampu meningkatkan kepatuhan perusahaan khususnya perusahaan publik peserta PROPER untuk

memenuhi kewajiban eksternalnya kepada lingkungan. Peningkatan skor pelaporan TJL belum cukup menggembirakan karena rata-rata skor pelaporan TJL setelah tahun 2007 (setelah UU ditetapkan) hanya sebesar 4,36. Rendahnya rata-rata skor pengungkapan disebabkan banyaknya perusahaan publik peserta PROPER yang tidak menyediakan informasi pada saluran komunikasi yang bisa diakses oleh publik (*website, annual report ataupun sustainability report*). Merujuk pada Clarkson et al (2008), perusahaan-perusahaan ini disebut sebagai “*silent company*” dan tetap menjadi sampel penelitian dengan skor pengungkapan TJL sebesar nol. Dengan keterbatasan tersebut, hasil penelitian ini menjadi kurang dapat digeneralisasi. Namun demikian, hasil uji dengan mengeluarkan “*silent company*” dari sampel penelitian masih menunjukkan bahwa tidak terjadi peningkatan skor pelaporan TJL yang signifikan setelah UU No. 40 tahun 2007 ditetapkan.

Masih rendahnya skor pelaporan TJL kemungkinan disebabkan beberapa hambatan dalam implementasi UU tersebut yaitu belum ada aturan terperinci di bawah UU No. 40 tahun 2007 (seperti PP) yang mengatur secara lebih teknis bagaimana mekanisme pelaporan TJSL, dan adanya penentangan (retensi) dari kalangan pengusaha terhadap kewajiban melaporkan TJSL. Penyebab lain adalah ketidakpastian hukum yang tinggi di Indonesia sehingga keinginan perusahaan untuk memenuhi tanggung jawab dan legitimasi kepada lingkungan eksternal menjadi rendah.

Kewajiban penyampaian informasi pengelolaan lingkungan yang dilakukan oleh perusahaan sebelumnya telah diatur dengan UU No. 23/1997 pasal 6 ayat 2: “Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan berkewajiban memberikan informasi yang benar dan akurat mengenai pengelolaan lingkungan hidup”. Selain pelaporan kepada regulator, pelaporan juga harus ditujukan kepada publik guna akuntabilitas yang lebih baik. Namun setelah lebih dari sepuluh tahun berlalu, akuntabilitas kepada publik khususnya mengenai lingkungan belum cukup memuaskan. Hal ini terlihat dari rendahnya skor pelaporan TJL dan peningkatan skor TJL yang tidak cukup signifikan setelah UU No. 40 tahun 2007 berlaku (Cahyonowati, 2008). Score TJL yang tidak meningkat kemungkinan juga disebabkan oleh karakteristik dari konten informasi dalam pengungkapan TJL yang mungkin merupakan informasi mengenai praktek TJL yang relatif tidak berubah sepanjang tahun.

Penelitian ini menemukan bahwa hubungan antara pelaporan TJL dengan kinerja TJL dapat diprediksi dengan teori berbasis ekonomis. Meskipun praktek pelaporan TJL dan kinerja TJL belum bisa disetarakan dengan praktek serupa di Amerika Serikat, namun basis teori yang dikonfirmasi pada hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian Clarkson et al. (2008). Perusahaan-perusahaan yang mempunyai kinerja TJSL yang baik mempunyai insentif untuk menunjukkan kinerja tersebut melalui pengungkapan informasi tentang indikator-indikator kunci kinerja TJSL yang tidak dapat dicapai oleh perusahaan-perusahaan yang lebih inferior kinerja TJSL-nya. Tindakan ini dilakukan karena perusahaan yang mempunyai “*good news*” (dalam hal ini kinerja TJSL yang baik) cenderung untuk mengungkapkannya agar pengguna informasi bisa membedakan perusahaan tersebut dengan perusahaan lain dengan “*bad news*” (dalam hal ini kinerja TJSL yang kurang baik). Dalam hal ini, perusahaan-perusahaan dengan kinerja TJSL yang superior karena strategi TJSL yang proaktif mempunyai insentif untuk memberikan informasi tersebut kepada investor dan pemangku kepentingan (*stakeholders*) lainnya. Dengan

mengungkapkan informasi tentang kinerja TJSL yang baik tersebut (sebagai *good news*), perusahaan ingin menunjukkan "kelasnya" yang berbeda dengan perusahaan lain. Argumentasi ini dibuktikan dengan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa perusahaan cenderung membuat '*hard disclosure*' yang lebih susah untuk ditiru perusahaan lain sehingga semakin menunjukkan "kelas" perusahaan. Penelitian ini membuktikan bahwa kinerja TJL berpengaruh signifikan pada pelaporan TJL dan sekaligus mengkonfirmasi bahwa hubungan antara kedua variabel tersebut dapat diprediksi dengan menggunakan teori berbasis ekonomis.

Hasil regresi menunjukkan bahwa profitabilitas hubungan positif dengan tingkat pelaporan TJL. Perusahaan-perusahaan dengan kinerja laba yang superior mempunyai kecenderungan untuk memperbanyak pengungkapan informasi tersebut dalam rangka menunjukkan "good news" kepada investor. Good news yang disampaikan kepada investor adalah pengungkapan mengenai TJL yang cenderung susah untuk ditiru (*hard disclosure*).

Uji regresi juga menunjukkan bahwa kepemilikan publik berhubungan negative dengan tingkat pelaporan TJL. Temuan ini tidak sesuai dengan hasil penelitian Marwata (2001) yang memprediksi bahwa semakin besar persentase kepemilikan publik semakin besar pula kecenderungan perusahaan untuk memenuhi ekspektasi publik khususnya mengenai TJSL yang kemudian diungkap dalam media komunikasi (*annual report, sustainability report dan web*).

KESIMPULAN DAN SARAN

UU No. 4 tahun 2007 belum mampu meningkatkan minat perusahaan publik untuk memenuhi kewajiban sosial khususnya kewajiban yang berhubungan dengan lingkungan. Score pelaporan TJL semakin meningkat setelah UU tersebut diberlakukan sejak tahun 2007, namun peningkatan tersebut tidak signifikan. Meskipun tidak terjadi peningkatan yang signifikan pelaporan TJL pada periode setelah berlakunya UU No. 4 tahun 2007, penelitian ini menunjukkan bahwa kinerja TJL merupakan determinan pengungkapan TJL. Temuan ini menunjukkan bahwa hubungan antara kedua variabel tersebut dapat diprediksi dengan teori berbasis ekonomis. Perusahaan juga cenderung untuk mengungkapkan item yang susah untuk ditiru (*hard disclosure*) dengan tujuan untuk menunjukkan "kelasnya".

Penelitian ini memiliki keterbatasan dalam hal verifikasi hasil *content analysis* skor pelaporan TJL yang dilakukan secara *random* (tidak dilakukan pada seluruh sampel perusahaan) sehingga kesalahan subjektif yang mungkin timbul dalam proses pengkodean belum sepenuhnya terdeteksi. Selain itu, penelitian ini hanya mengambil data pada *website* perusahaan dengan pertimbangan bahwa *disclosure* merupakan hal yang penting untuk mencitrakan diri perusahaan. Namun demikian, terdapat 16 perusahaan go public yang tidak menyediakan saluran untuk mengkomunikasikan aktivitas sosialnya (melalui *website, annual report, ataupun sustainability report*). Bagaimana "*silent company*" ini melaporkan TJL masih belum diteliti dan hal tersebut menjadi keterbatasan penelitian ini.

Penelitian yang akan datang sebaiknya menggunakan *sustainability report* untuk melakukan *content analysis*. Hal ini karena tujuan *sustainability report* lebih spesifik untuk melaporkan TJSL perusahaan secara rinci dibandingkan dengan *annual report* yang hanya berisi laporan TJSL secara garis besar. *Sustainability report* pada umumnya disusun berpedoman pada indikator GRI (*Global Reporting Initiative*). Namun demikian, belum ada penelitian yang

menilai sejauh mana tingkat kesesuaian *sustainability report* perusahaan publik di Indonesia pada indikator GRI.

Lampiran

'Silent Company'

1. PT. Toba Pulp Lestari, Tbk.
2. PT. Sat Nusa Persada, Tbk.
3. PT. Surya Toto Indonesia, Tbk.
4. PT. Tri Polyta Indonesia, Tbk
5. PT. Unggul Indah Cahaya, Tbk. (UIC)
6. PT. Phapros, Tbk.
7. PT. Indo Acidatama, Tbk
8. PT. Pabrik Kertas Tjiwi Kimia, Tbk
9. PT. Teijin Indonesia Fiber, Tbk. (TIFICO)
10. PT. Surabaya Agung Industri Pulp & Kertas, Tbk.
11. PT. Suparma, Tbk.
12. PT. Budi Acid Jaya
13. PT. Indah Kiat Pulp & Paper Riau
14. PT. Medco EP – Rimau
15. PT. Indorama Synthetics, Tbk. – Bandung
16. PT. Daya Sakti Unggul Corporation

REFERENSI

- Anggraeni, Fr. Reni. Retno. 2006. "Corporate Social Disclosure and Its Influencing Factors (Empirical Evidence from Public Registered Companies on The Jakarta Stock Exchange)." *The 9th Indonesian National Symposium in Accounting*.
- Berry, W. D., Stanley Feldman. 1985. *Multiple regression in practice*. Sage Publications, Inc. Beverly Hills.
- Cahyonowati, Nur. 2003. "Factors Influencing Social Disclosure of Public Listed Company in Indonesia". *Thesis. Diponegoro University. Unpublished*.
- Cahyonowati, Nur. 2008. "Determinants of corporate social responsibility disclosure of Indonesian public listed companies". *Laporan Penelitian DIPA FE Undip 2008*.
- Clarkson, P.M et al., 2008. Revisiting the relation between environmental performance and environmental disclosure: An empirical analysis. *Accounting, Organisations and Society*, Vol. 33 , pp. 303-327.
- Cowen, S.S., Ferreri, L.B. and Parker, L.D. (1987), "The impact of corporate characteristics on social responsibility disclosure: a typology and frequency-based analysis", *Accounting, Organisations and Society*, Vol. 12 No. 2, pp. 111-22.
- Deegan Craig. 1999. "Triple Bottom Line Reporting: A New Reporting Approach for the Sustainable Organization." *Charter. April*.
- Fauzi, Hasan. 2006. "Corporate Social and Environmental Performance: A Comparative Study Between Indonesian Companies and Multinational Companies (MNCs) Operating in Indonesia". *Proceeding Paper of The 18th Asian-Pacific Conference on International Accounting Issues*.
- Fitriany. 2001. "The Difference of Mandatory Disclosure and Voluntary Disclosure Among Public Registered Company In Indonesia". *Proceeding Paper of The 4th Indonesian Symposium of Accounting*.
- Gray, R., Kouhy R., Lavers. 1995. "Corporate Social and Environmental Reporting: A Review on The Literature and Longitudinal Study of UK Disclosure". *Accounting, Auditing & Accountability Journal*. Vol. 8. No. 2. pp. 47-77.
- Gujarati, Damodar. 2003. *Basic Econometrics* 4th edition. McGraw Hill
- Hackston, David, Markus J. Milne. 1996. "Some Determinants of Social and Environmental Disclosure in New Zealand Company". *Accounting, Auditing & Accountability Journal*. Volume 9. No. 1.

- Heinze, D.C. (1976), "Financial correlates of a social involvement measure", *Akron Business and Economic Review*, Spring.
- Indonesian Accountant Association. 2001. *Statement of Financial Accounting Standard*.
- Jalal. 2008. TJSI untuk Pembangunan Daerah secara Berkelanjutan. *Makalah dalam www.TJSIIndonesia.com*
- Kanungo, Parameeta; Magüi Moreno Torres. Indonesia's Program for Pollution Control, Evaluation, and Rating (PROPER). Empowerment Case Studies: Indonesia's PROPER. www.yahoo.com 25 April 2007.
- Kementrian Negara Lingkungan Hidup. 2008. *Laporan hasil penilaian PROPER periode 2006-2007*.
- Marwata. 2001. The Relation of Company Characteristics and The Quality of Voluntary Disclosure in Annual Report of Public Registered Company In Indonesia. *Proceeding Paper of The 4th Indonesian Symposium of Accounting*.
- Mas'ud, Machfoedz. 1995. "The Movement of Perception Concerning Earnings, Efficiency, and Corporate Social Responsibility to Compete in Global Market". *Kajian Bisnis STIE Widya Wiwaha*. No. 4.
- Rizal, Hasibuan. 2001. "The Effect of Company Characteristics on Social Disclosure in Annual Report of Public Registered Company in Indonesia". *Thesis on Magister of Accounting of Diponegoro University*.
- Parker, Lee D. 1995. "Social and Environmental Accountability: International and Asian Perspective. Contemporary Issues In Accounting." *Singapore Business Development Series*.
- Paten, Denis. 2002. The relation between environmental performance and environmental disclosure: A research note. *Accounting, Organisations and Society*, Vol. 27 pp. 763-773.
- Raar, Jear. 2002. "Environmental initiatives: towards triple bottom line reporting". Corporate communication: *An International Journal*. Volume 7. Number 3.
- Sawarjono. 2000. "Notation of External Activity into Financial Statement". *AKUNTANSI*. No. 4. April.
- Suratno, Bondan Ignatius. 2006. "The Effect Environmental Performance on Environmental Disclosure and Economic Performance". Thesis on Magister of Accounting of Diponegoro University. Unpublished.

Verrechia, R. 1983. Discretionary disclosure. *Journal of Accounting and Economics* Vol 5, pp 179-194

World Resources Institute of World Bank. 2003. Box 6.3 The polluters exposed: The power of Indonesia's public ratings program. World Resources 2002-2004: Decisions for the Earth: Balance, voice, and power. www.yahoo.com 1 April 2007.